

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Demokrasi	35
C. Tinjauan Umum Tentang Transisi Menuju Demokrasi Politik Dan Pemilu Langsung Di Indonesia.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum	46
E. Politik Uang Dalam Praktik Demokrasi Di Indonesia	52
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	58
B. Jenis-jenis Pendekatan	60
C. Bahan Penelitian	61
D. Lokasi dan Subjek Penelitian	63
E. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	64
F. Analisis Data.....	65
G. Jalannya Penelitian.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68



A.	Politik Hukum Pengaturan Politik Uang Dalam Undang-Undang Pemilu Pasca Reformasi.	68
1.	Politik Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Undang-undang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	75
a.	Pengaturan Politik Uang Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003	78
b.	Pengaturan Politik Uang Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008	80
c.	Pengaturan Politik Uang Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012	84
2.	Politik Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Undang-undang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.....	88
a.	Pengaturan Politik Uang Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003	89
b.	Pengaturan Politik Uang Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008	90
3.	Politik Hukum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	93
4.	Disharmoni Norma pengaturan politik uang sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dengan KUHP dan UU Pilkada.	101
B.	Badan Pengawas Pemilu Menterjemahkan Pengaturan Politik Uang Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasannya.	110
1.	Sejarah Lahirnya Bawaslu	110
2.	Perluasan Tugas dan Wewenang Bawaslu RI Dalam Menindak Tindak Pidana Politik Uang.....	113
C.	Prospek Pengaturan Politik Uang Untuk Pemilu Yang Akan Datang Dalam Konteks <i>Ius Constituendum</i>	124
1.	Gagasan Pengaturan Politik Uang.....	129
2.	Gagasan Upaya Penanggulangan Pencegahan Praktik Politik Uang	145
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		148
A.	Kesimpulan.....	148
B.	Saran	150
DAFTAR PUSTAKA		152
INDEKS ISTILAH		161
INDEKS SUBJEK		163
GLOSARIUM		166
LEMBAR WAWANCARA NARASUMBER		168

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Elemen Vote Buying</i> Dalam UU/10/2003	81
Tabel 2. <i>Elemen Vote Buying</i> Dalam UU/23/2003 dan UU/42/2008	91
Tabel 3. <i>Elemen Vote Buying</i> Dalam UU/42/2008, UU/82012, UU/7/2017	97
Tabel 4. Ketentuan Sanksi Pidana Politik Uang.....	105
Tabel 5. Perbedaan Kewenangan Antara Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	117
Tabel 6. Perluasan Kewenangan Bawaslu RI Dalam UU/15/2011 dengan UU/7/2017	119
Tabel 7. <i>Element Vote Buying</i> Menurut Penulis.....	138
Tabel 8. Gagasan Pengaturan Politik Uang	143